



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOHANES BAPTISTA SATYA SANANUGRAHA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 204529

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah Seluas 2920 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	61.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOBIL, VW KODOK Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	300.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.195.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.228.035.361
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.785.035.361
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.785.035.361

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.